

# Mencegah Bangsa Ini Terkoyak

Oleh: Gatut Priyowidodo, Ph.D

**A**rema publik Indonesia sepertinya semakin sesak pesan-pesan simbolik. Pihak satu diwakili kekuatan Islam penyokong Patwa MUI yang menyebut dirinya GNPF MUI terang benderang sangai ambisius menjebloskan Ahok ke penjara. Lainnya lagi kelompok nasionalis pembela kebhinnekaan berusaha keras tampil sebagai penyeimbang.

Panggung politik tersketsa sebagai wilayah pertarungan unjuk kekuatan antara Islam politik radikal versus minoritas militan. Kelompok terakhir tadi, semakin berani mengekspresikan diri karena tekanan sempalan kelompok mayoritas yang intoleran dan menantang pluralitas.

Pasca putusan hakim PN Jakarta Utara (9/05/17) yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rasa terkejutnya keadilan semakin menjadi-jadi. Jika terus menerus, kelompok minoritas diperlakukan seperti itu, maka pertanyaannya Indonesia yang pluralis ini, apakah tetap bisa dipertahankan 10-30 tahun kedepan?

**Tes Kebijaksanaan**  
Sekalipun sangat beresiko

tinggi, pemerintahan Jokowi patut diacungi jempol karena berani memutarbalikkan salah satu pengusung ideologi khilafah yakni Hizbut Thahrir Indonesia atau HTI. Meskipun tergolong lambat, tindakan kecil itu sudah mencerminkan bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar.

Ada tiga alasan penyebabnya. Pertama, sebagai omas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk membangun bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Omas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Alasan lain disampaikan Kepala BIN, Budi Gunawan. Pembubaran HTI bukan karena kegiatan dakwahnya, tetapi kegiatan politiknya yang mengusung ideologi khilafah.



Ideologi ini diperjuangkan lintas negara. Artinya, HTI ingin mendirikan negara Islam yang lintas negara dan lintas batas. (*Suara Pembaruan*, 14 Mei 2017).

Selain Indonesia, HTI juga dilarang di beberapa negara. Hingga (2017) ini, ada 20 negara yang melarang aktivitas Hizbut Thahrir. Negara-negara itu antara lain, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia dan Pakistan. Ini artinya, lintas Asia, Afrika dan Eropa, tidak senang bila identitas 'keakuannya' diontjol-tonjolkan.

Pemimpin memang tidak harus menyenangkan semua lapisan masyarakatnya. Tapi paling tidak pemimpin harus berani menawarkan ketekaduan melalui sikap, tindakan dan gaya berpikir. Tidak ada agama

yang menentang itu semua. Namun sayang dalam praktiknya nilai-nilai luhur tersebut sangat diabaikan. Bukan Tuhan yang diprioritaskan, tapi justru ke-egoisan yang diontjolkan.

## Merangkul Semua

Risiko sebuah bangsa yang plural adalah rentan terjadinya gesekan. Terlebih bila dikaitkan dengan sentimen agama dan ras. Apa yang terjadi di Suriah, hanya sepele pengkisah yang secara akurat memberikan data dan fakta. Bahwa ajaran agama yang baik, kian kehilangan roh kebaikannya saat dikelola oleh orang yang anti humanisme. Kebaikan berubah kelir menjadi kebengisan. Kecerdasan beragama beralih rupa menjadi kepandiran yang menyalahgunakan irasionalitas. Apakah itu yang kita mau?

Gerakan yang terus mengahjar kebhinnekaan, sekarang tidak sembuyni-sembuyni. NKRI bahkan digugat bahwa itu bukan islami. Jika kemeksatan dan kerusakan moral ingin diatasi, harus ditegakkan negara bersendi khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban dakwah Islami ke seluruh dunia.

Bila secara orisinal kedua fungsi itu diterapkan, tidak menutup kemungkinan benturan budaya, agama yang berbeda, etnik yang tidak sama serta beragam identitas primordial semakin tidak terlakan. Itulah sebabnya Indonesia yang tidak menganut ideologi tersebut sejak bedirinya, secara tegas menolak ide-ide sektarian dan eksklusif seperti itu.

Ketegasan pemerintah melarang ide khilafah demi keutuhan NKRI adalah kentsenyaaan. Merangkul keragaman adalah menjunjung nilai kemanusiaan. Memusnahkan kebhinnekaan, semakin terganggu pintu kehancuran. Maka negara tidak boleh tinggal diam. Jika rakyat terus bergerak menyebarkan keadilan dengan menyalaikan seribu lilin, jangan pula menguasai melakukan gerakan pemertan lilin, demi menyenangkan kelompok sektarian yang jelas-jelas anti NKRI. Gerakan nyalaan seribu lilin, hanyalah perlambang nasionalisme tetap bangkit dan Pancasila tetap ada demi peristiwa yang jaya.

**\*Gatut Priyowidodo, Ph.D**

Ketua Pusat Riset Komunikasi Petra (PKRP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.